

Dampak Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Belanja Daerah terhadap Kriminalitas di Provinsi Kepulauan Riau

Ranita Dewi Olyvia^{1*}, Lucky Rachmawati²

¹Program Studi Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Program Studi Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ranitaolyvia@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of the Human Development Index (HDI), Income Inequality, Open Unemployment Rate (OUR), and Regional Expenditure on crime rates in the Province of the Riau Islands during the 2017–2025 period. This study uses secondary data analyzed using the Fixed Effect Model (FEM) method. The results of the panel data regression analysis show that HDI and Regional Expenditure have a negative and significant effect on crime rates, while Income Inequality and the Open Unemployment Rate have a positive and insignificant effect on crime rates. Simultaneously, all independent variables significantly affect crime rates. These findings indicate that socio-economic factors play an important role in influencing crime levels in the Province of the Riau Islands.*

Keywords: *Crime Rate; Human Development Index; Income Inequality; Open Unemployment Rate; Regional Expenditure; Fixed Effect Model*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Belanja Daerah terhadap kriminalitas di Provinsi Kepulauan Riau periode 2017–2025. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Hasil regresi data panel menggunakan penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka dan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas, Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap kriminalitas. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kriminalitas di Provinsi Kepulauan Riau.

Kata kunci: Kriminalitas; Indeks Pembangunan Manusia; ketimpangan pendapatan; Tingkat Pengangguran Terbuka; belanja daerah; Fixed Effect Model

1. LATAR BELAKANG

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan dapat menghambat pembangunan suatu daerah. Tingkat kriminalitas tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan belanja daerah. Berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi kondisi sosial serta meningkatkan atau menurunkan kecenderungan individu dalam melakukan tindakan kriminal.

Kepulauan Riau memiliki karakteristik sosial ekonomi yang khas karena berbatasan dengan Singapura dan Malaysia serta berada di jalur perdagangan internasional. Kondisi ini mendorong aktivitas industri, perdagangan, dan investasi, terutama di Batam sebagai pusat ekonomi, sekaligus menimbulkan kesenjangan antarwilayah dalam pendapatan, kesempatan kerja, dan pembangunan manusia yang dapat berkaitan dengan kriminalitas (Susanto, 2023). Tingkat kriminalitas di Kepulauan Riau berfluktuasi dengan kasus dominan seperti pencurian, narkoba, dan penganiayaan. Penelitian ini menggunakan *crime rate* per 100.000 penduduk agar tingkat kriminalitas dapat dibandingkan secara objektif antarwilayah (Yuzani, 2024).

Di sisi lain, IPM Kepulauan Riau mencapai 75,79, tetapi masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah, dengan Batam sebesar 81,12 dan Lingga sebesar 65,83 (BPS, 2021). Sitanggang dan Hutapia (2024) serta Budiarta dan Anggraini (2024) menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak selalu menurunkan kriminalitas, bahkan perkembangan teknologi dapat memunculkan kejahatan siber dan penipuan. Oleh karena itu, peningkatan IPM perlu disertai pemerataan pembangunan dan perluasan kesempatan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan antarindividu atau kelompok masyarakat (Rahmadi, S., 2019). Di Kepulauan Riau, kondisi ini terlihat dari terkonsentrasinya penduduk dan aktivitas ekonomi di Batam, sementara wilayah lain masih memiliki keterbatasan akses dan fasilitas publik yang dapat berkaitan dengan kriminalitas (Trisnawati, 2019). Namun Kurniasih et al. (2024) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas, sehingga menunjukkan adanya *research gap*. Sementara itu, Indeks Gini Kepulauan Riau yang berada pada kisaran 0,33–0,35 dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kesenjangan masih terjadi dan berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan yang berkaitan dengan kriminalitas (Widodo, 2023).

Tingginya TPT menunjukkan terbatasnya kesempatan kerja dan dapat meningkatkan kerentanan terhadap kriminalitas. Di Kepulauan Riau, konsentrasi lapangan kerja di Batam menyebabkan wilayah seperti Tanjung Pinang, Bintan, dan pulau-pulau kecil memiliki akses kerja yang lebih terbatas (Najasyi & Aminda, 2022),

sehingga dapat memicu *economic strain* yang mendorong perilaku menyimpang (Agnew, 1922). Hal ini sejalan dengan Alzahri dan Syafitri (2025) yang menemukan pengaruh signifikan pengangguran terhadap kriminalitas. Faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kriminalitas adalah belanja daerah. Selain itu, belanja daerah melalui pelayanan publik, pembangunan, dan fungsi ketertiban serta keamanan juga berpotensi memengaruhi kriminalitas. Khusyhi dan Rachmawati (2025) menemukan bahwa belanja pada fungsi tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di Jawa Timur. Oleh karena itu, pengkajian IPM, ketimpangan pendapatan, TPT, dan belanja daerah di Kepulauan Riau diperlukan sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja, dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Kriminalitas

a. Definisi Kriminalitas

Kriminalitas merupakan perilaku yang melanggar hukum dan dapat mengganggu ketertiban serta merugikan masyarakat (Siegel, 2011). Tingkat kriminalitas tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah. Sugiharti et al. (2022) menunjukkan bahwa pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, dan karakteristik sosial ekonomi berkaitan dengan kriminalitas di Indonesia. Oleh karena itu, IPM, ketimpangan pendapatan, TPT, dan belanja daerah digunakan untuk menganalisis keterkaitan kondisi kesejahteraan dan pembangunan dengan tingkat kriminalitas.

b. Teori Kesejahteraan Sosial

Teori Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Theory*) yang dikembangkan Arthur Cecil Pigou (1920) dalam *The Economics of Welfare* menekankan peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan kualitas hidup, pemerataan pendapatan, dan peran pemerintah. Dalam kaitannya dengan kriminalitas, kesejahteraan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas SDM, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan belanja daerah dapat mengurangi kerentanan sosial, sedangkan kondisi sebaliknya berpotensi meningkatkan kriminalitas. Sugiharti et al. (2022) dan

Kurnia Qurrotul A'yun et al. (2026) juga menunjukkan adanya hubungan antara indikator kesejahteraan, seperti IPM, pengangguran, ketimpangan, dan pengeluaran per kapita, dengan kriminalitas. Oleh karena itu, *Social Welfare Theory* relevan digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini.

2.2 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. BPS (2023) mengukur IPM melalui umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Konsep tersebut sejalan dengan UNDP (2020) yang menempatkan peningkatan kualitas hidup sebagai tujuan utama pembangunan manusia. Semakin tinggi IPM, semakin baik kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, sehingga IPM dapat digunakan sebagai gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pembangunan manusia.

a. Teori Modal Manusia

Hubungan IPM dengan kriminalitas dapat dijelaskan melalui *Human Capital Theory* Schultz (1961), yang menempatkan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan sebagai investasi untuk meningkatkan peluang ekonomi individu. Kualitas modal manusia yang lebih baik dapat memperluas kesempatan kerja dan pendapatan legal sehingga berpotensi menekan kriminalitas (Lochner, 2004). Sejalan dengan hal tersebut, Budiarta dan Anggraini (2024) menemukan adanya keterkaitan antara IPM dan kriminalitas di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan IPM diperkirakan dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dan menekan tingkat kriminalitas.

2.3 Ketimpangan Pendapatan

a. Definisi Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi tidak meratanya distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Todaro

dan Smith (2015) memandang ketimpangan sebagai penyimpangan dari pemerataan pendapatan, sedangkan Kuznets (1955) menjelaskan bahwa ketimpangan dapat muncul pada tahap awal pembangunan ketika manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara merata. BPS (2023) mengukur ketimpangan melalui koefisien Gini, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin timpang. Sementara itu, World Bank (2020) mengaitkan ketimpangan dengan perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan sosial.

b. Teori Relative Deprivation

Teori *relative deprivation* menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan perasaan tertinggal, frustrasi, dan ketidakadilan ketika individu membandingkan kondisi ekonominya dengan kelompok yang lebih sejahtera (Gurr, 1970). Kondisi tersebut berpotensi mendorong tindakan antisosial atau kriminal sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Sejalan dengan perspektif tersebut, penelitian lintas wilayah menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung berhubungan positif dengan kriminalitas, meskipun pengaruhnya dapat berbeda berdasarkan jenis kejahatan (Enamorado et al., 2016). Dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut juga dapat bervariasi antarwilayah sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berlaku

2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Definisi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja, tetapi tersedia dan sedang berupaya memperoleh pekerjaan. Menurut ILO, penganggur merupakan individu yang tidak memiliki pekerjaan, siap bekerja, dan aktif mencari pekerjaan. Sudono (2019) menjelaskan bahwa pengangguran terbuka mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja. Sementara itu, Blanchard (2017) memandang pengangguran sebagai indikator kondisi makroekonomi dan efisiensi pasar tenaga

kerja. Dengan demikian, TPT dapat menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menyediakan dan menyerap tenaga kerja.

b. Teori Human Capital

Teori *Human Capital* Schultz (1961) memandang pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kesehatan sebagai bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas serta peluang kerja individu. Rendahnya kualitas modal manusia dapat membatasi kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran, yang pada akhirnya berpotensi berkaitan dengan kriminalitas. Pandangan ini didukung oleh Lochner (2004) yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pekerjaan dapat menekan kriminalitas melalui peningkatan modal manusia. Selain itu, Raphael dan Winter-Ebmer (2001) menemukan pengaruh positif pengangguran terhadap beberapa jenis kejahatan, sedangkan Lee dan Holoviak (2006) menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara pengangguran dan kriminalitas.

2.5 Belanja Daerah

a. Definisi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan bagian dari APBD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sekaligus mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Dalam perspektif *public expenditure*, pengeluaran pemerintah berperan dalam penyediaan layanan publik, infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas sosial ekonomi. Dengan pengelolaan yang efektif, belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja, dan memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan publik.

b. Teori Pengeluaran Publik

Teori *Public Expenditure* Musgrave (1959) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya, pemerataan, dan menjaga stabilitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah pada sektor

pelayanan publik, perlindungan sosial, serta ketertiban dan keamanan dapat mendukung stabilitas sosial dan menekan kriminalitas. Hal ini didukung Ramdayani, Kharisma, dan Wibowo (2019) di Jawa Barat serta Khusyhi dan Rachmawati (2025) di Jawa Timur yang menemukan adanya pengaruh belanja pemerintah terhadap kriminalitas. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan belanja daerah berpotensi berkontribusi dalam mengurangi kriminalitas.

2.6 Penelitian Relevan

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi memiliki keterkaitan dengan kriminalitas, meskipun hasilnya beragam. Budiarta dan Anggraini (2024) menemukan pengaruh negatif IPM terhadap kriminalitas. Susanto dan Pratiwi (2023) serta Kurniasih et al. (2024) menunjukkan keterkaitan ketimpangan, kemiskinan, dan pendidikan dengan kriminalitas. Trisnawati (2019) menemukan adanya efek *spillover* antarprovinsi. Rahmadi dan Parmadi (2019) serta Sari dan Lubis (2021) mengaitkan ketimpangan dengan kesenjangan kesejahteraan. Amilia dan Ridwan (2024) menemukan pengaruh positif dan signifikan pengangguran terhadap kriminalitas, sedangkan Inayati dan Setiawan (2017) menunjukkan peran belanja pemerintah dalam pembangunan. Perbedaan temuan tersebut menjadi *research gap* untuk menguji pengaruh IPM, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan belanja daerah terhadap kriminalitas di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data numerik yang diolah untuk menganalisis hubungan antarvariabel. Populasi penelitian mencakup seluruh 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kepulauan Anambas, Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, Batam, dan Tanjungpinang. Sampel ditentukan melalui *sampling jenuh* (sensus), dengan periode pengamatan selama 9 tahun berdasarkan *purposive time sampling*. Dengan demikian, diperoleh 63 unit observasi dari 7 kabupaten/kota selama 9 tahun. Menggunakan metode regresi linier berganda untuk analisis olah data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari BPS Provinsi Kepulauan Riau, DJPK, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dan instansi terkait. Data mencakup IPM, ketimpangan pendapatan, TPT, belanja daerah, dan kriminalitas pada periode 2017–2025 di Provinsi Kepulauan Riau. Periode tersebut mencakup kondisi sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19 sehingga dapat menggambarkan dinamika sosial-ekonomi dan kriminalitas di wilayah penelitian.

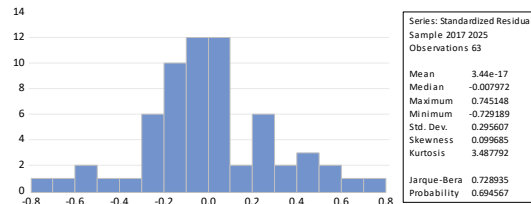
4.1 Hasil

Sample: 2017 2025				
Periods included: 9				
Cross-sections included: 7				
Total panel (balanced) observations: 63				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.800808	2.328613	2.920540	0.0052
LOG(BD)	-0.497818	0.253742	-1.961905	0.0551
GINI	3.076590	1.996169	1.541247	0.1293
IPM	0.016428	0.017439	0.942069	0.3505
TPT	-0.050387	0.026939	-1.870368	0.0671
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.956788	Mean dependent var		5.186384
Adjusted R-squared	0.948478	S.D. dependent var		1.422041
S.E. of regression	0.322782	Akaike info criterion		0.733636
Sum squared resid	5.417789	Schwarz criterion		1.107835
Log likelihood	-12.10955	Hannan-Quinn criter.		0.880810
F-statistic	115.1364	Durbin-Watson stat		1.566208
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel Least Squares, Belanja Daerah, Ketimpangan Pendapatan, IPM, dan TPT secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2017–2025, dengan nilai probabilitas 0,0000. Secara parsial, LOG(BD) memiliki pengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien -0,4978 ($p = 0,0551$), sementara GINI menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan dengan koefisien 3,0766 ($p = 0,1293$). IPM juga berpengaruh positif namun tidak signifikan sebesar 0,0164 ($p = 0,5505$), sedangkan TPT berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien -0,0504 ($p = 0,0671$). Model FEM menunjukkan daya jelas yang tinggi, ditunjukkan oleh R^2 sebesar 95,68% dan Adjusted R^2 sebesar 94,85%. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,5662 juga menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi yang serius. Dengan demikian, model yang

digunakan dinilai cukup kuat dalam menerangkan variasi tingkat kriminalitas antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

a. Hasil Normalitas



Normalitas residual diuji menggunakan metode Jarque-Bera. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 63 observasi, menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,694567. Nilai tersebut berada di atas tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada model penelitian mengikuti distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

b. Hasil Multikolinearitas

BD	GINI	IPM	TPT
1.000000	0.384812	0.552599	0.568667
0.384812	1.000000	0.399445	0.194844
0.552599	0.399445	1.000000	0.478827
0.568667	0.194844	0.478827	1.000000

Berdasarkan uji multikolinearitas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF), seluruh korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,80, dengan nilai tertinggi antara Belanja Daerah (BD) dan TPT sebesar 0,568667. Dengan demikian, model tidak mengalami masalah multikolinearitas dan layak digunakan dalam estimasi regresi.

c. Hasil Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/09/26 Time: 11:27
Sample: 2017 2025
Periods included: 9
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(Y)	0.005859	0.011138	0.526082	0.6011
C	0.135007	0.201780	0.669080	0.5065
LOG(BD)	-0.027845	0.021120	-1.318417	0.1933
TPT	-0.001971	0.002235	-0.881580	0.3821
GINI	-0.008250	0.163944	-0.050321	0.9601
IPM	0.001007	0.001412	0.713111	0.4790

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser diperoleh nilai probabilitas seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05, yaitu probabilitas IPM (0,4790) dan Belanja Daerah (0,1933), demikian pula TPT (0,3821) serta Gini Ratio (0,9601). Konsekuensinya H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model regresi tidak

mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, variance residual pada model penelitian bersifat konstan dan asumsi terpenuhi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh IPM terhadap Kriminalitas

Hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa IPM berkoefisien positif sebesar 0,0164, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Kepulauan Riau selama 2017–2025 (prob. 0,3505 > 10%). Temuan ini sejalan dengan Budiarta dan Anggraini (2024) serta Renita (2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup belum tentu secara langsung menurunkan kriminalitas, terutama di Kepulauan Riau yang memiliki mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi tinggi.

4.2.2 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas

Hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kriminalitas di Kepulauan Riau periode 2017–2025, dengan koefisien 3,076 dan probabilitas 0,1293 (>10%). Temuan ini sejalan dengan Susanti dkk. (2025) dan Nabila (2025). Arah positif tersebut sesuai dengan teori *relative deprivation*, tetapi ketimpangan bukan faktor dominan karena kriminalitas juga dipengaruhi kesempatan kerja, kondisi sosial-ekonomi, mobilitas penduduk, dan efektivitas kebijakan.

4.2.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kriminalitas

Hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa TPT berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Kepulauan Riau periode 2017–2025, dengan koefisien 0,050 dan probabilitas 0,067 (<10%), yang berarti kenaikan TPT sebesar 1% berkaitan dengan peningkatan kriminalitas sebesar 0,050%. Namun, hubungan tersebut dapat dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi, seperti sektor informal, dukungan keluarga, bantuan sosial, dan kontrol sosial. Sukirno (2019) menjelaskan bahwa karakteristik pengangguran, baik struktural maupun sukarela, menyebabkan tekanan ekonomi yang berbeda. Temuan ini sejalan dengan Atthoriq dkk. (2024) serta Kasma dan Permata Sari (2024) yang

menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kriminalitas. Di Indonesia, pengangguran terdidik menyumbang proporsi pengangguran yang tinggi, sementara individu berpendidikan cenderung memiliki pertimbangan rasional dan kesadaran hukum yang lebih baik sehingga relatif kecil kemungkinannya melakukan tindak kriminal. Dengan demikian, hubungan TPT dengan kriminalitas bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi karakteristik pengangguran serta kondisi sosial-ekonomi masing-masing wilayah.

4.2.4 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kriminalitas

Hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 10% terhadap kriminalitas di Kepulauan Riau periode 2017–2025, dengan koefisien -0,4978 dan probabilitas 0,0551. Dalam model log-log, kenaikan Belanja Daerah sebesar 1% diperkirakan menurunkan kriminalitas sebesar 0,4978%. Temuan ini sejalan dengan Ramdayani et al. (2019) dan dapat dikaitkan dengan peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat yang berpotensi menekan kriminalitas.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Belanja Daerah terhadap kriminalitas di Kepulauan Riau tahun 2017–2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kepulauan Riau. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat belum terbukti secara statistik mampu memengaruhi perubahan tingkat kriminalitas di Kepulauan Riau.
2. Ketimpangan Pendapatan yang diproksikan dengan Gini Ratio memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kepulauan Riau. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung

diikuti oleh peningkatan kriminalitas, tetapi pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik sehingga ketimpangan pendapatan belum menjadi faktor utama yang menentukan perubahan tingkat kriminalitas

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di Kepulauan Riau. Artinya, peningkatan TPT justru cenderung diikuti penurunan kriminalitas. Kondisi ini diduga berkaitan dengan karakteristik pengangguran, terutama tingginya proporsi pengangguran terdidik yang memiliki kemampuan berpikir rasional dan kesadaran hukum lebih baik. Selain itu, keberadaan sektor informal dan dukungan sosial dapat menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga tekanan pengangguran tidak selalu mendorong individu melakukan tindak kriminal.
4. Belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kepulauan Riau. Peningkatan belanja daerah dapat menekan kriminalitas melalui perbaikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Secara simultan, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kepulauan Riau tahun 2017–2025.

5.2 Saran

Pemerintah daerah Kepulauan Riau disarankan untuk mengoptimalkan belanja daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial, serta memperluas kesempatan kerja melalui penguatan sektor industri, UMKM, dan ekonomi kreatif. Pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu terus dilakukan guna mendukung kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel seperti kemiskinan, urbanisasi, kepadatan penduduk, dan penegakan hukum, serta memperluas periode dan cakupan wilayah penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alzahri, M. D., & Syafitri, W. (2025). *The Effects of Unemployment, Poverty, Education, and Income Disparity on Crime Rate in West Sumatra*. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 4(2), 597–610.
- Amilia, D., & Ridwan, P. (2024). *Analisis Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 693–706. DOI: 10.59141/japendi.v5i12.6319.
- Atthoriq, W., Septriani, S., & Winarni, E. (2024). *Analisis pengaruh ketimpangan pendapatan dan pengangguran terhadap PDRB melalui kriminalitas di Indonesia*. *Jurnal Development*, 12(2), 192–209.
- A'yun, K. Q., Sumaiyah, A., Wardani, N. H., Zelika, S. D. A., Ramadan, A., & Sesay, A. (2026). *Econometric analysis of poverty and economic welfare as predictors of criminal activity in Indonesia*. *Journal of Advances in Information and Industrial Technology*, 8(1), 47–56
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson.
- Enamorado, T., López-Calva, L. F., Rodríguez-Castelán, C., & Winkler, H. (2016). Income inequality and violent crime: Evidence from Mexico's drug war. *Journal of Development Economics*, 120, 128–143
- Inayati, N. I., & Setiawan, D. (2017). *Fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(2), 220–239. DOI: 10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.2062.
- Kasma, J. A., & Permata Sari, Y. (2024). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas di Indonesia*. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(3), 311–321.
- Kurniasih, N., Agustin, R., & Pratiwi, A. (2024). Unveiling the links: How poverty, unemployment, education, and income inequality drive crime in Indonesia? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 39(1), 45–59.
- Lee, D. Y., & Holoviak, S. J. (2006). *Unemployment and Crime: An Empirical Investigation*. *Applied Economics Letters*, 13(12), 805–810.
- Lochner, L. (2004). *Education, Work, and Crime: A Human Capital Approach*. *International Economic Review*, 45(3), 811–843
- Najasyi Qausar, & Aminda, R. S. (2022). *Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau*. *Journal of Development Economic and Digitalization*, 1(1), 38–50
- Susanti, S. T., Ambya, A., Ananta, P., Suparta, I. W., & Murwiati, A. (2025). Pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*, 2(6), 1794–1801.
- Pigou, A. C. (1932). *The economics of welfare* (4th ed.). Macmillan
- Ramdayani, S. S., Kharisma, B., & Wibowo, K. (2019). *Local Government Spending on Social Protection, Security Order, and Crime*. *Jurnal Economia*, 15(2), 259–274.

- Rahmadi, S., & Parmadi. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 55–66.
- Raphael, S., & Winter-Ebmer, R. (2001). *Identifying the effect of unemployment on crime. The Journal of Law and Economics*, 44(1), 259–283.
- Renita (2024). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kriminalitas di Kalimantan Barat Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Muamalat Indonesia*, 4(2), 640–653.
- Sari, N. P., & Lubis, A. (2021). Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Riau. *Repository Universitas Riau*.
- Sitanggang, M. P. M. B., & Hutapia, H. (2024). The effect of HDI, population density, poverty, and income inequality on criminality in DKI Jakarta Province. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 94–101.
- Siegel, L. J. (2011). *Criminology: The core* (4th ed.). Cengage Learning
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori pengantar* (Edisi ke-3). Rajawali Pers.
- Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Agustin, L., & Rohmawati, H. (2022). *Criminality and income inequality in Indonesia. Social Sciences*, 11(3), 142.
- Susanto, E., & Pratiwi, L. (2023). Pengaruh ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Development*, 11(2), 100-115.
- Trisnawati, D. (2019). Inter-provincial spatial linkages of crime pattern in Indonesia: An application of spatial panel econometric analysis. *Indonesian Journal of Geography*, 51(1), 58–69.
- Widodo, T., & Hartono, B. (2022). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kriminalitas. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1), 50-67.
- Yuzani, D. A., Deswina, L. F., Ifonne, M. H., & Suryadi. (2024). *Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas: Analisis di Kota Tanjungpinang*. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 165–173.